



2022

***RENCANA KERJA
(RENJA)***

***DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BARAT***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselesaikan. Rencana Kerja Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2022 dan sebagai tolak ukur bagi pihak berwenang dalam menilai Pembangunan pada sector Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan sebuah dokumen yang merupakan landasan dan acuan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana pada tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat untuk Tahun 2022, dan bagi semua pihak yang membantu Penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Barat



Erni Wanti, SH, M.Si
NIP. 19690125 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	26
	2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	30
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	TUJUAN, SASARAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT	
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	53
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK	57
	3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	79
BAB IV	PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.....	11
Tabel 2. Kegiatan yang Melebihi Target Tahun 2021.....	13
Tabel 3. Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2021.....	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional.....	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung...	15
Tabel 6. Perbandingan Pagu antara Renstra, Renja dan Renja 2021.....	16
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021.....	16
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.....	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.....	28
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat.....	32
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Aceh Barat.....	44
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.....	59
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	61
Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan, dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dapat menjadi suatu dokumen yang sangat penting dalam pemetaan dan pendataan untuk penyusunan rancangan dan penetapan arah kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan dimasa yang akan datang untuk menggali sumberdaya perikanan dan kelautan dalam penyelesaian masalah-masalah kelautan dan perikanan saat ini.

Penyusunan Rencana Kerja yang tepat sasaran didukung oleh adanya potensi dan sumber daya yang tersedia yang merupakan jalan menuju arah kesuksesan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mendorong pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat yaitu meliputi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir untuk penunjang industri perikanan.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah **“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegrasi”**.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun kedepan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-3 Tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. **Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan pemerintahan Aceh Barat yang bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, akidah dan akhlaq.

2. **Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan Pertama, mengsosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsinki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hukum dan terorisme.
3. **Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan sumber daya alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang Mitigasi Bencana disalah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinsos melalui kerja sama dengan kampus-kampus khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan dengan system koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.
4. **Meningkatkan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak (Honoror) dan Teungku Dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
5. **Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olah raga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal).** Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan mementaskan/mempromosikan seni tradisional Kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuhkembangkan tradisi/kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga hal dimaksud dapat

dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olah Raga Nasional (KONI).

6. **Pembangunan Prasarana dan Sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.** Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan perternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali “*Budaya Meuseuraya*” sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang berkerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang perternakan mengembangkan perternakan terpadu berwawasan agribisnis.
7. **Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan.** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
8. **Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.** Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/tengku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjut di dalam dan luar negeri. Beasiswa yang isediakan oleh pemerintah baik yang berprestasi dan bantuan pendidikan sepenuhnya dikelola oleh Bagian Kesra

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Infak dan Sadakah (Baitul Mal).

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu dijabarkan dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan yang menjadi program unggulan daerah. Berdasarkan hasil analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat merumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Syariat Islam ;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
3. Stabilitas Perdamaian ;
4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Pemantapan Ketahanan Pangan ;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia ;
6. Pengembangan Pariwisata, Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat ;
7. Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup ; serta
8. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan.

Adapun Misi yang berkaitan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat adalah *misi-3 dan Misi-6*. *Misi – 3* yaitu **Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan**. Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan sumber daya alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda).

Misi – 6 yaitu **Pembangunan Prasarana dan Sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional**. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali “*Budaya Meuseuraya*” sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang berkerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang peternakan, mengembangkan peternakan terpadu berwawasan agribisnis.

Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 dengan Tema “**Melalui Musrenbang Tahun 2022 kita Mantapkan Sarana Infrastruktur Dasar, Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Sosial Budaya Yang Berkelanjutan Berlandaskan Dinul Islam**” Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, ini merupakan suatu proses pemikiran strategis

untuk menyikapi isu-isu yang berkembang pada sektor ekonomi dan pelayanan dasar di Kabupaten Aceh Barat yang diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah dan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan nama dinas tetapi terjadi perubahan dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian, Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 3 Kepala Seksi dan Bidang Perikanan Budidaya terdiri 3 Kepala Seksi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017- 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 disusun berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Rencana Kerja Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;
 18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud menetapkan Program dan Kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan. Juga menjadi pedoman dan acuan bagi Pelaksana Teknis Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama Tahun 2022 serta melakukan sinkronisasi terhadap Program - Program dalam Perubahan RKPD dengan mengutamakan isu – isu strategis pada Tahun 2022.

b. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dalam menentukan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA).
3. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pad asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan OPD, Perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penyusunan Perubahan Renja, Landasan Hukum Penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja, serta Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Bab ini berisi hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja DKP Aceh Barat tahun 2020, meliputi Program dan Kegiatan yang *Kurang dari Target*, Yang *memenuhi target* dan yang *melebihi target*.

- 1.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD*, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBK tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja SKPK sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPK berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPK tahun-tahun sebelumnya.
- 1.2 *Analisis Kinerja Pelayanan SKPK*, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPK yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPK perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPK yang bersangkutan.
- 1.3 *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK*, berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPK, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional, serta SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPK dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJADAN PENDANAAN OPD

- 3.1 *Program dan Kegiatan*, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Awal RKPD, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator out comes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran Target Kinerja dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2021	Realisasi 2021	Selisih	Status
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	20.412	20.690	21.066,50	+101,8	Diatas Target
2	Meningkatnya Masyarakat Konsumsi Ikan	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,50	53,00	54,1	+1,1	Melebihi Target
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	100	100	100	0	Mencapai Target
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP Dinas	70	70	70	0	Mencapai Target
4	Meningkatnya Cakupan Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	40,38	52,00	34	-18	Dibawah Target
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	40,95	32,00	31	-1	Dibawah target
5	Meningkatnya Produksi Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	N/A	20.400	20.300,79	-99,21	Dibawah target
		Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan (Ton)	N/A	290,00	765,71	+475,71	Diatas Target
6	Meningkatnya Sumber Daya Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengolah yang dilatih (Persen)	N/A	67	0	-67	Dibawah target
		Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih (Orang)	N/A	30	0	-30	Dibawah target
		Jumlah Nelayan, Petani Pembudidaya dan Pengolah yang dilatih (Orang)	140	30	0	-30	Dibawah target
7	Meningkatnya Pengawasan Perikanan dan Kawasan Budidaya Perikanan	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi (Kecamatan)	N/A	4	6	+2	Diatas Target
		Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi (Kecamatan)	N/A	4	6	+2	Diatas Target
		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan (Kawasan)	N/A	1	1	0	Mencapai Target

Untuk mencapai Target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 476.340.729,- yang telah terealisasi secara keseluruhan dengan serapan dana 95,73%

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelenangan Ikan (TPI)
- Yang kesemua kegiatan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 1.506.806.599,- dengan serapan mencapai 97,17 %.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan rincian kegiatan:

- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Dengan total porsi anggaran Rp. 1.767.887.727,- (99,29 %)

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan :

- Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Dengan total porsi anggaran Rp. 31.940.000,- yang telah terealisasi secara keseluruhan dengan serapan dana 100 %.

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat pada Tahun Anggaran 2021 ada 1 Indikator Kinerja yang melebihi target kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2
Kegiatan yang Melebihi Target Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target 2021	Realisasi 2021	Selisih %	Status
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	20.412	20.690	21.066,50	+101,8	Diatas Target
2	Meningkatnya Masyarakat Konsumsi Ikan	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,50	53,00	54,1	+1,1	Melebihi Target
3	Meningkatnya Produksi Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan (Ton)	N/A	290,00	765,71	+475,71	Diatas Target
4	Meningkatnya Pengawasan Perikanan dan Kawasan Budidaya Perikanan	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi (Kecamatan)	N/A	4	6	+2	Diatas Target
		Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi (Kecamatan)	N/A	4	6	+2	Diatas Target

Adapun Target Kinerja Tahun 2021 yang melebihi target adalah Peningkatan Produksi Perikanan sebesar 21.066,50 yang melebihi target dengan selisih sebesar +101,8 Ton, Peningkatan Konsumsi Ikan Mencapai 54,1 (Kg/Kapita/Tahun) yang melebihi target dengan selisih nilai 1,1 1 (Kg/Kapita/Tahun). Hal ini dimungkinkan karena gencarnya sosialisasi secara nasional yang berimbas ke daerah, disamping upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan dari Dinas SKPD terkait.

Produksi perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan sebesar 765,71 Ton yang melebihi target dengan selisih hampir 465,71 Ton. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang intensif dan berkelanjutan terhadap petani dari Dinas SKPD Terkait. Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi (Kecamatan) dan Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi (Kecamatan) yang melebihi target dengan selisih nilai 2. Sedangkan target Indikator Kinerja Tahun 2021 yang Tidak Memenuhi Target dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target 2021	Realisasi 2021	Selisih (org)
1	Meningkatnya Cakupan Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	40,38	52,00	34	-18
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	40,95	32,00	31	-1
2	Meningkatnya Produksi Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	N/A	20.400	20.300,79	-99,21
3	Meningkatnya Sumber Daya Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengolah yang dilatih (Persen)	N/A	67	0	-67
		Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih (Orang)	N/A	30	0	-30
		Jumlah Nelayan, Petani Pembudidaya dan Pengolah yang dilatih (Orang)	140	30	0	-30

Adapun Target Kinerja Tahun 2021 yang tidak memenuhi target adalah Indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan yang masing masing memiliki selisih angka 18 untuk indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan, 1 untuk Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan, dan 99,21 untuk Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan. Tidak terpenuhinya target capaian pada indikator tersebut disebabkan tidak tersedianya dana yang cukup sesuai yang direncanakan pada tahun 2021.

Indikator Jumlah Pengolah yang dilatih, Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih, Jumlah Nelayan, Petani Pembudidaya dan Pengolah yang dilatih Pada tahun Anggaran 2021 ini tidak melatih satu orang pun, hal ini disebabkan karena adanya Virus Corona yang telah melanda Indonesia sehingga di lakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan tidak boleh membuat kerumunan. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI 2021 (Ton)	TARGET NASIONAL 2019 (Juta Ton)
			Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	3	4	5	6
1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	20.280	20.690	21.066,50	21.100
2	Meningkatnya Ketersediaan Hasil Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan (Kg / Kapita / Tahun)	52,50	53,00	54,1	53,50

Faktor keberhasilan Capaian Kinerja di Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2021 adalah atas upaya pembinaan dan pendampingan serta peningkatan sumber daya manusia petani, nelayan dan pengolah hasil perikanan dari dinas walaupun belum maksimal. Diharapkan setiap tahunnya produksi Perikanan akan terus meningkat dan Konsumsi Ikan dapat dipertahan capaian kinerjanya dengan mensosialisasi Gemar Makan Ikan.

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Petani pembudidaya Ikan, Nelayan, Pengolah Hasil Perikanan dan Aparatur Teknis yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan Dinas terus berupaya untuk terus meningkatkan Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk lebih maju dimasa yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 dengan Jumlah Belanja setelah Perubahan sebesar Rp. 6.021.874.622,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung / Belanja Modal sebesar Rp. 265.390.185,- dan Belanja Langsung / Belanja Operasi sebesar Rp. 5.756.484.437,- dengan rasio 95,59% Belanja Langsung / Belanja Operasi dan untuk Belanja Tidak Langsung / Belanja Modal sebesar 14,87% sebagaimana Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2021

NO	BELANJA	Dana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung / Belanja Modal	265.390.185,00	4,40
2	Belanja Langsung / Belanja Operasi	5.756.484.437,00	95,59
	Jumlah	6.021.874.622,00	100,00

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sebanyak 5 Program, 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan Total Belanja Langsung / Belanja Operasi sebesar Rp. 5.756.484.437,00,-. Sementara itu dalam Rencana Strategis 2017-2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.576.087.050,00,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 6
Perbandingan Pagu antara Renstra, Renja dan Renja Perubahan Tahun 2021

Uraian Belanja Langsung		Dana (Rp)
1	Rencana Strategis Tahun 2021	5.576.087.050,-
2	Renja Tahun 2021	4.565.025.178,-
3	Renja Perubahan Tahun 2021	5.617.329.218,-

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Setelah Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 6.021.874.622,00 dengan Realisasi Rp. 5.899.434.727,00 atau sebesar 97,97 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung / Belanja Modal sebesar Rp. 265.390.185,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 243.310.643,00 atau sebesar 91,68% dan Belanja Langsung / Belanja Operasi sebesar Rp. 5.756.484.437,00 dengan Realisasi sebesar Rp.5.656.124.084,00 atau sebesar 98,26% %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021

No	Belanja	Pagu Anggaran 2020		Pagu Anggaran 2021		Total Realisasi 2020 (%)	Total Realisasi 2021 (%)
1	Belanja Tidak Langsung	2.094.850.641	39,00	265.390.185	4,40	91,65	91,68
2	Belanja Langsung	3.276.176.804	61,00	5.756.484.437	95,59	93,41	98,26
	Jumlah	5.371.027.445	100,00	6.021.874.622	100,00	92,73	97,97

Dari Tabel diatas terlihat adanya Kenaikan Jumlah Pagu Anggaran Belanja dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun 2020, yaitu dari Rp. 5.371.027.445,- menjadi Rp. 6.021.874.622,- atau naik sebesar Rp. 650.847.177 (12,12%).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat s/d Tahun Berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COMES)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN TAHUN 2017 - 2022		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) TAHUN 2021	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA s/d TAHUN 2020 (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100	Persen	-	-	-	-	100	95	95
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	Persen	-	-	-	-	88	82	93,18

		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A	Nilai	-	-	-	-	A	A	A
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	-	-	-	-	8	8	100
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3	Dokumen	-	-	-	-	2	2	100
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	2	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	2	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	4	Dokumen	-	-	-	-	2	2	100
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen dan pelaporan administrasi keuangan	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.02.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya pengelolaan akuntansi SKPD	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100

3.25.01.2.02.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Legalitas Bahan	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.06.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya kegiatan perkantoran	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Perkantoran	4	Unit	-	-	-	-	2	4	200

3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan perkantoran	6	Unit	-	-	-	-	3	1	33,33
3.25.01.2.07.11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Prima	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Prima	24	Bulan	-	-	-	-	12	0	0
3.25.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	24	Bulan	-	-	-	-	12	12	100

3.25.01.2.09.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan	21100	Ton	-	-	-	-	20690	20300	98,12
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	20800	Ton	-	-	-	-	20400	19850	97,3
3.25.03		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	52,56	Persen	-	-	-	-	52	34	65,31
		Jumlah nelayan yang dilatih	120	orang	-	-	-	-	30	0	0
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan	16	Paket	-	-	-	-	8	0	0
3.25.03.2.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan	2	Dokumen	-	-	-	-	1	0	0
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana usaha perikanan tangkap	2	Paket	-	-	-	-	1	1	100
3.25.03.2.01.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	12	Paket	-	-	-	-	6	6	100
3.25.03.2.01.03	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	10	Kali	-	-	-	-	5	0	0
3.25.03.2.02	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi nelayan kecil	2	Kali	-	-	-	-	1	0	0

3.25.03.2.02.01	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2	Paket	-	-	-	-	12	12	1
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya sosialisasi, dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	6	Kali	-	-	-	-	3	0	0
3.25.03.2.02.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	6	Paket	-	-	-	-	3	0	0
3.25.03.2.03	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	2	SOP	-	-	-	-	1	0	0
3.25.03.2.03.01	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan TPI	4	Unit/Paket	-	-	-	-	2	0	0
3.25.03.2.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	300	Ton	-	-	-	-	290	765,71	263,63
3.25.04		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	34	Persen	-	-	-	-	32	31	95,31
		Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih	180	Orang	-	-	-	-	30	0	0
3.25.04.2.02		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	5	Kawasan	-	-	-	-	1	0	0

3.25.04.2.02.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kualitas sumberdaya petani pembudidaya ikan	6	Kali	-	-	-	-	3	0	0
3.25.04.2.02.04	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi petani pembudidaya ikan kecil	4	Kali	-	-	-	-	2	0	0
3.25.04.2.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya sosialisasi, seminar dan bimtek bagi petani pembudidaya ikan	2	Kali	-	-	-	-	1	0	0
3.25.04.2.04.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan	22	Paket	-	-	-	-	11	0	0
3.25.04.2.04.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	4	Paket	-	-	-	-	4	4	100
3.25.04.2.04.06	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidaya ikan	10	Paket	-	-	-	-	3	8	266,67
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidayaan.	2	Paket	-	-	-	-	1	0	0
3.25.05	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber air pembudidayaan ikan	6	Paket	-	-	-	-	3	0	0

	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	8	Kecamatan	-	-	-	-	4	4	100
3.25.05.2.01		Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	8	Kecamatan	-	-	-	-	4	4	100
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya	12	Kecamatan	-	-	-	-	4	4	100
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan Tangkap	12	Kecamatan	-	-	-	-	4	4	100
3.25.06	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	4	Kecamatan	-	-	-	-	2	0	0
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	70	Persen	-	-	-	-	67	0	0
		Nilai Konsumsi Ikan	53,5	kg/kapita/tahun	-	-	-	-	53	0	0
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil	2	Kali	-	-	-	-	1	0	0

3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya sosialisasi/bimtek dan penerapan standart pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	2	Kali	-	-	-	-	1	0	0
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	3	Paket	-	-	-	-	1	0	0
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	3	Paket	-	-	-	-	1	0	0

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2022 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut dengan hasil dari kegiatan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 5 yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi 3 Kegiatan yaitu Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangn Ikan (TPI)
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi 1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi 1 Kegiatan yaitu Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
 - e. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi 1 Kegiatan yaitu Penyedia dan Penyaluran Bahan Baku dan Industri Pengelolaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target tahun 2021 dikarenakan kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya Dana yang mencukupi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan pelayanan belum maksimal. Namun demikian tingkat keberhasilan pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari indikator sasaran, target yang telah ditentukan pada periode sebelumnya dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangannya belum terlalu memadai. Hal ini dapat dilihat pada tingkat produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan belum mencapai seperti yang diharapkan. Belum optimalnya Pembinaan terhadap Nelayan Perikanan Tangkap, Petani Pembudidaya Ikan serta Pengolah Hasil

Perikanan. Akibat kurangnya pengetahuan tentang teknis penanganan hasil tangkapan, sehingga menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas hasil tangkapan. Dengan adanya pembinaan pada kelompok perikanan maka dapat meningkatkan capaian produksi kelompok perikanan.

Pada saat ini masih maraknya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, baik yang dilakukan oleh nelayan dalam daerah, diluar Provinsi Aceh serta nelayan asing. Oleh karena pengawasan perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kelestarian laut sehingga ketersediaan ikan diperairan laut di Kabupaten Aceh Barat dapat dipertahankan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan perairan laut antara lain tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Apabila terjadi penangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ada petugas yang menangani permasalahan sampai kejalur hukum. Pada saat melakukan pengawasan alat tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan turun bersama Tim dari Unsur Angkatan Laut, Airud, beserta unsur dari Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat. Untuk lebih jelas Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

TABEL. 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BARAT

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n- 2)	(thn n- 1)	(thn n- n)	(thn n-2)	(thn-n)	(thn n)	(thn + n)	
1	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	-	-	20.280	20.690	21.100	20.488	21.066,50	21.100	21.300	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan / Target Daerah
2	Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	-	-	52,50	53,00	53,50	53,1	54,1	53,50	54	Jumlah Konsumsi Ikan per KG/Kapita/Tahun
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Binaan Kelompok Nelayan
4	Nilai AKIP Dinas	-	-	70	70	70	70	70	70	70	Jumlah Kelompok Binaan Pembudidaya Ikan
5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	-	-	52,00	52,00	52,56	52,06	34	52,56	52,85	Jumlah Produksi Rata-Rata Hasil Perikanan kelompok Nelayan
6	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	-	-	30,00	32,00	34,00	30,1	31	34,00	34	Jumlah Rata-Rata Penghasilan Petani Pembudidaya Ikan
7	Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	-	-	20.000	20.400	20.800	19.826	20.300,79	20.800	21.000	Jumlah Rata-Rata Penghasilan Pengolah Ikan

8	Peningkatan Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan (Ton)	-	-	280,00	290,00	300,00	662	764,52	300,00	310,00	Jumlah rata-rata penghasilan Petani Pembudidaya
9	Jumlah Pengolah yang dilatih (Persen)	-	-	63	67	70	0	0	70	70	Jumlah Sumberdaya Nelayan dan Pembudidaya yang dilatih
10	Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih (Orang)	-	-	0	30	30	0	0	30	30	Pengawasan wilayah pembudidaya perikanan
11	Jumlah Nelayan, Petani Pembudidaya dan Pengolah yang dilatih (Orang)	-	-	0	30	30	0	0	30	30	Pengawasan wilayah Perikanan tangkap
12	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi (Kecamatan)	-	-	N/A	4	4	4	12	4	4	Jumlah Rata-rata pengawasan wilayah pembudidaya perikanan
13	Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi (Kecamatan)			N/A	4	4	4	12	4	4	Jumlah Rata-rata pengawasan wilayah Perikanan Tangkap
14	Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan (Kawasan)			0	1	1	1	1	1	1	Jumlah Rata-rata pengawasan wilayah pembudidaya perikanan

Permasalahan dinas pada saat ini adalah terbatasnya Staf dan Tenaga Penyuluh Perikanan yang ada di Aceh Barat sebanyak 1 Orang yang akan menyuluh untuk 2 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan pada Dinas saat ini di perbantukan juga Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 5 Orang dimana terdiri dari 5 Orang Penyuluh Program Kementrian dan 0 Orang Enumerator. Honorarium dibiayai oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (APBN). Tugas Pokok dari Penyuluh Perikanan Bantu adalah melakukan pendampingan dan pengembangan pelaku usaha perikanan seperti Koperasi Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan.

Untuk menutupi kekurangan tenaga penyuluh perikanan, maka Dinas Kelautan harus berperan aktif dalam Pembinaan terhadap Petani Pembudidaya Ikan, Nelayan serta Pengolah Hasil Perikanan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas terbatasnya tenaga teknis dan sumber daya manusianya masih rendah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai Dinas Teknis. Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Produksi Perikanan Budidaya maupun Perikanan Tangkap.
2. Terbatasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.
3. Belum optimalnya Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Belum Terbangunnya Balai Benih Ikan (BBI) yang sesuai dengan standar Teknis.
5. Masih maraknya nelayan dalam penangkapan ikan menggunakan Alat yang Tidak Ramah Lingkungan.
6. Masih rendahnya SDM Aparatur, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan
7. Belum tersedianya industri pengolahan hasil-hasil perikanan dan terbatasnya produk olahan hasil perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara hasil identifikasi kebutuhan Program dan Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan Kinerja Pencapaian Target Renstra SKPK dan Tingkat Kinerja yang dicapai SKPK, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan Prioritas Program / Kegiatan serta Pagu Indikatif yang disediakan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021
KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Aceh Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	2.616.324.925	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Aceh Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,00	2.369.391.278	
		Aceh Barat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	88			Aceh Barat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	82,00		
		Aceh Barat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	A			Aceh Barat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	A		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	56.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	27.370.500	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1	18.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	7.243.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya RKA-SKPD	1	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya RKA-SKPD	1	3.959.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	1	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	1	4.104.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya DPA-SKPD	1	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya DPA-SKPD	1	3.959.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1	4.104.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Aceh Barat	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	2	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Aceh Barat	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	2	3.999.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Meningkatnya kualitas dokumen dan pelaporan administrasi keuangan		2.014.624.925	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Meningkatnya kualitas dokumen dan pelaporan administrasi keuangan	12	1.883.445.512	
		Aceh Barat					Aceh Barat		12		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	2.002.624.925	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	1.878.813.512	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aceh Barat	Terlaksananya pengelolaan akuntansi SKPD	12	12.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aceh Barat	Terlaksananya pengelolaan akuntansi SKPD	12	4.632.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh Barat			200.340.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh Barat		12	154.147.311	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	2.323.161	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	28.089.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	3.003.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	10.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh Barat	Tersedianya Legalitas Bahan	12	13.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh Barat	Tersedianya Legalitas Bahan	12	11.960.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aceh Barat	Tersedianya Bahan Bacaan	12	3.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aceh Barat	Tersedianya Bahan Bacaan	12	1.920.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aceh Barat	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	12	133.720.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aceh Barat	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	12	98.850.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aceh Barat			40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aceh Barat		4	39.602.185	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Perkantoran	2	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Perkantoran	1	36.654.625	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya perlengkapan perkantoran	3	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya perlengkapan perkantoran	12	2.947.560	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		213.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	174.065.770	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Barat	Tersedianya Materai	12	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Barat	Tersedianya Materai	12	1.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Barat	Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik	12	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Barat	Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik	12	51.040.770	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	12	166.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	12	121.275.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.220.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	90.760.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Prima	12	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Prima	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Prima	12	10.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Prima	12	79.150.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	20300	11.610.000	

		Aceh Barat					Aceh Barat		19850		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aceh Barat	Produksi perikanan	20600	1.677.471.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aceh Barat	Produksi perikanan	34	1.444.906.500	
		Aceh Barat	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	20.000			Aceh Barat	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	0		
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	52				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	0		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan		905.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan		1.361.335.500	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan	1	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan	1	237.548.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya Sarana Pendukung usaha perikanan tangkap	1	50.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya Sarana Pendukung usaha perikanan tangkap	6	1.123.787.500	

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	6	805.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	0	0	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil		207.471.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	0	83.571.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Terlaksananya pelatihan bagi nelayan kecil	1	29.271.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Terlaksananya pelatihan bagi nelayan kecil	0	0	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1	70.200.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1	83.571.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Terlaksananya sosialisasi, dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	3	108.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Terlaksananya sosialisasi, dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	0	0	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI		565.000.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	0		
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	1	30.000.000	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	0		
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan TPI	2	535.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan TPI	764,52		

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	280	1.015.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	31	718.787.400
	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	32			Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	0	0
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kualitas sumberdaya petani pembudidaya ikan		95.000.000,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kualitas sumberdaya petani pembudidaya ikan	0	0
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi petani pembudidaya ikan kecil	2	60.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi petani pembudidaya ikan kecil	0	0
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya sosialisasi, seminar dan bimtek bagi petani pembudidaya ikan	1	35.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya sosialisasi, seminar dan bimtek bagi petani pembudidaya ikan	0	0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan		920.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan	0	718.787.400

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	2	300.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	0	360.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana pembudidaya ikan	5	360.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana pembudidaya ikan	4	358.787.400	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidayaan.	1	60.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidayaan.	8	0	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber air pembudidayaan ikan	3	200.000.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber air pembudidayaan ikan	0	0	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	2	160.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	0	31.940.000	
			Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	12				Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	4	0	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya		160.000.000,00	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang		Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya	4	31.940.000	

	Dalam Kabupaten/Kota					Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan Tangkap	12	120.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan Tangkap	4	31.940.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	2	40.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	4	0	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Pengolah Ikan yang dilatih	20	107.291.125	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Pengolah Ikan yang dilatih	0	0	
			Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	70				Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	0	0	
			Nilai Konsumsi Ikan	49,54				Nilai Konsumsi Ikan	0	0	

	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil		37.291.125	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil	0	0	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya sosialisasi/bintek dan penerapan standart pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	1	37.291.125	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya sosialisasi/bintek dan penerapan standart pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	0	0	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan		70.000.000	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	0	0	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	1	70.000.000	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	0	0	
JUMLAH SELURUHNYA					5.576.087.050	JUMLAH SELURUHNYA					4.565.025.178

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program / Kegiatan dari masyarakat merupakan hasil kajian terhadap Program / Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPK Kab / Kota yang langsung ditujukan kepada SKPK maupun berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan pengamatan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Gampong Tahun 2021.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan pengumpulan informasi di lapangan mengenai kebutuhan masyarakat dan dari hasil Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat akan mengakomodir dalam Rencana Kerja Usulan Masyarakat dalam RAPBK Tahun 2021 setelah melakukan Survey kembali Calon Penerima dan Calon Lokasi di Gampong di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Meureubo, Panton Reu, Woyla Timur, Arongan Lambalek, Meureubo, Arongan Lambalek, Pante Ceureumen, Panton Reu, Bubon serta Kecamatan Kaway XVI.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut ini :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Aceh Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.232.649.850	
		Aceh Barat	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai		
		Aceh Barat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	36.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya RKA-SKPD	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya DPA-SKPD	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Aceh Barat	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Aceh Barat	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aceh Barat	Meningkatnya kualitas dokumen dan pelaporan administrasi keuangan	4.029.249.850	
		Aceh Barat			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aceh Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aceh Barat	Terlaksananya pengelolaan akuntansi SKPD	24.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh Barat		400.680.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman	24.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Aceh Barat	Tersedianya Legalitas Bahan	27.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aceh Barat	Tersedianya Bahan Bacaan	6.240.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aceh Barat	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	267.440.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aceh Barat		80.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya Peralatan Perkantoran	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Barat	Tersedianya perlengkapan perkantoran	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.280.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh Barat	Tersedianya Materai	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aceh Barat	Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh Barat	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	333.280.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.440.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Prima	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh Barat	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Prima	20.440.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh Barat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	

		Aceh Barat			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aceh Barat	Produksi perikanan	3.327.630.000	
		Aceh Barat	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan	1.785.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan	75.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya Sarana Pendukung usaha perikanan tangkap	100.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	1.610.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	412.630.000	

	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Terlaksananya pelatihan bagi nelayan kecil	57.457.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	140.400.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Terlaksananya sosialisasi, dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	214.773.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	1.130.000.000	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	60.000.000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan TPI	1.070.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	2.030.000.000	
			Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Meningkatnya kualitas sumberdaya petani pembudidaya ikan	190.000.000	

	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Terlaksananya pelatihan bagi petani pembudidaya ikan kecil	120.000.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya sosialisasi, seminar dan bimtek bagi petani pembudidaya ikan	70.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan	1.840.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	600.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sarana pembudidaya ikan	720.000.000	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidayaan.	120.000.000	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber air pembudidayaan ikan	400.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	305.501.000	

			Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya	305.501.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan Tangkap	225.501.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	80.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Pengolah Ikan yang dilatih	256.393.250	
			Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan		
			Nilai Konsumsi Ikan		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil	74.582.250	

	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terlaksananya sosialisasi/bintek dan penerapan standart pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	74.582.250	
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	181.811.000	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	181.811.000	

BAB III

TUJUAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan strategi dan kebijakan Nasional sebagaimana yang tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2017 – 2022 dengan Visi Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dimana terdiri dari 7 Misi dengan 9 Agenda Proiritas (Nawacita). Prioritas Bidang Ekonomi dinamakan dengan Berdikari Dalam Bidang Ekonomi dengan 16 Program Aksi :

1. Dedikasikan Pembangunan Kualitas SDM
2. Membangun Kedaulatan Pangan Berbasis Agri Bisnis Kerakyatan.
3. Mendedikasi program untuk membangun daulat energy berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan sumber daya alam melalui 7 langkah dan membangun regulasi mewajibkan CSR dan saham untuk masyarakat local/sekitar tambang, penguasaan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun Pemberdayaan Buruh.
6. Membangun Sektor Keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan Investasi Domestik.
8. Membangun Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
9. Membangun Infrastruktur.
10. Membangun Ekonomi Maritim.
11. Penguatan Sektor Kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun Perimbangan Pembangunan Kawasan.
14. Membangun Karakter dan Potensi Wisata.
15. Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional.
16. Pengembangan Industri Manufaktur.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia disusun sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 / PER-SJ / 2016 Tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2020. Dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Visi yakni ” **Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional** ”.

Visi KKP mengandung 4 kunci penting yaitu **Mandiri** dimaksudkan kedepan indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. **Maju** dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan sumber daya manusia kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

yang tinggi dan merata. **Kuat** artinya memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. **Berbasis Kepentingan Nasional** dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat.

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Terdapat 3 (Tiga) pilar yang menjadi Misi KKP yaitu :

1. Kedaulatan (Sovereignty) yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability) yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity) yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum dilaut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. **Keberlanjutan** dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga kelestarian sumberdaya. **Kesejahteraan** diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah / pemasar hasil perikanan, petambak garam dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Kepentingan nasional yang dimandatkan kepada KKP utamanya adalah terkait dengan pemberantasan Illegal, *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang akan berdampak pada aspek produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran serta konservasi dengan didukung oleh SDM Kompeten dan IPTEK yang inovatif. Hal tersebut untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas kabinet kerja, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keaneka

ragaman hayati laut.

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan inovasi dan iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2020 sebagai penjabarat Visi dan Misi pembangunan nasional. maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan ;
2. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ;
3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung Jawab, berdaulat dan berkelanjutan ;
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan yang Partisipatif ;
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan ;
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Partisipatif ;
7. Terwujudnya ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian ;
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah di Akses ;
9. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima ;
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efisien dan Akuntabel

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih periode tahun 2017-2022 adalah ” **Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani** ”.

Visi diatas akan tercapai melalui 10 (sepuluh) Misi utama yaitu :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani ;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dan Budaya ke – Acehan ;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki ;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional, nasional dan internasional ;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi dan berkualitas ;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan ;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan ;

8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif ;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan ;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Program kerja yang dapat mengayomi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh perlu direncanakan demi terciptanya suasana Aceh yang kondusif. Program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih periode 2017-2022 yaitu :

1. Aceh Sejahtera (JKA Plus)
2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
3. Aceh Carong
4. Aceh Energi
5. Aceh Meugo dan Melaot
6. Aceh Troe
7. Aceh Kreatif
8. Aceh Kaya
9. Aceh Peumulia
10. Aceh Green
11. Aceh Dame
12. Aceh Meudadab
13. Aceh Teuga
14. Aceh Seuninya
15. Aceh Seumeugot

Berdasar Visi Misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintah Aceh tertera dalam semua program unggulan yang ada. Dalam menjalankan program kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada program unggulan Pemerintah Aceh yaitu Aceh Meugo dan Melaot, Aceh Peumulia, Aceh Green dan Aceh SIAT.

Adapun Sasaran Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Aceh yang terkait dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Tujuan Aceh Meugo dan Meulaot yang terkait dengan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan Aceh ;
 - b. Menurunkan jumlah daerah rawan pangan aceh ;
 - c. Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam pada bidang Kelautan dan Perikanan ;
 - d. Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pada bidang Kelautan dan Perikanan ;

- e. Meningkatkan produk unggulan kelautan dan perikanan lokal yang kreatif, inovatif serta memiliki nilai kekhasan daerah.
2. Sasaran Tujuan Aceh Peumulia yang terkait dengan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan dinas, pengelolaan sumber daya manusia dan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Meningkatkan kinerja dan layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 3. Sasaran Tujuan Aceh SIAT yang terkait dengan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning ;
 - b. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah.
 4. Sasaran Tujuan Aceh Green yang terkait dengan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah :
 - a. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir ;
 - b. Meningkatnya rehabilitasi vegetasi pantai dan vegetasi mangrove di kawasan pesisir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPK

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat tidak boleh lepas dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022, adapun yang menjadi Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi Kelautan dan Perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan dapat meningkatkan pendapatan ;
2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pencapaian tujuan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi Kelautan dan Perikanan ;
3. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung jawab dan berkelanjutan, pencapaian tujuan ini ditandai dengan terwujudnya pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dan meningkatnya pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan illegal fishing ;

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya tenaga-tenaga yang trampil dan ahli secara teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebutuhan sehingga pembangunan dapat berkelanjutan.
3. Meningkatnya Konsumsi Ikan per kapita.
4. Meningkatnya pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan illegal fishing.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga tenaga teknis dapat melakukan pembinaan kepada Petani Budidaya Perikanan dan Nelayan Perikanan Tangkap serta dapat ditingkat pembinaan untuk pengolah Hasil perikanan yang berdaya guna.

Secara lebih rinci keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BARAT

VISI : Terwujudnya Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Tangguh, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat			
MISI 1 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Perikanan Tangkap, Budidaya Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Produksi dan Pruduktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kapasitas sentra-sentra produksi Kelautan dan Perikanan yang memiliki komoditas unggulan	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan	Meningkatkan Pemanfaatan Penggunaan Sarana dan Prasarana bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka Pembangunan Ekonomi Masyarakat
MISI 2 : Melestarikan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Petani Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pengolah hasil Perikanan	Meningkatkan Pembinaan terhadap Petani Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pengolah	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pembudidaya ikan, Nelayan Perikanan Tangkap dan Pengolah Hasil Perikanan
		Meningkatkan Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan	Meningkatkan Operasi Pengawasan secara terpadu bersama TNI-AL, Polri dan Unsur Panglima Laut
Misi 3 : Meningkatkan Pembinaan kepada Petani Pembudidaya, Nelayan dan Pengolah Hasil Perikanan dengan mengenalkan Penerapan Teknologi			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
---------------	----------------	-----------------	------------------

Meningkatnya Pengetahuan Petani Pembudidaya Ikan dan pengolah hasil perikanan dalam penerapan teknologi kelautan dan perikanan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani Pembudidaya, Nelayan dan Pengolah	Meningkat sumber daya manusia dan penerapan Teknologi kelautan dan perikanan	Mengupayakan pembinaan secara kontinue kepada kelompok-kelompok Petani Pembudidaya, Nelayan dan Pengolah Hasil Perikanan
MISI 4 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Jumlah Produksi Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebutuhan sehingga Pembangunan dapat Berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Perikanan, Kualitas Produk Pengolahan Hasil Perikanan sehingga dapat berdaya saing	Memfasilitasi Penyediaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas pendukung sektor Kelautan dan Perikanan
MISI 5 : Meningkatkan Kemampuan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas, sehingga dapat meningkatkan kinerja dinas selaku dinas teknis			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli secara teknis dibidang Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berwawasan Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada sektor Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan jumlah Tenaga Penyuluh Perikanan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan dalam program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPK guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Tingkat keberhasilan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dapat diukur dengan peningkatan Produksi Perikanan baik Perikanan Tangkap maupun Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi

dari Kelompok – Kelompok yang mendapat bantuan dari Kementerian, Binaan kelompok perikanan semakin meningkat serta Tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat seperti yang kita harapkan.

Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Rencana Tahun 2022		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Lokasi	Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	2.616.324.925	12	2.616.324.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Presentase	90		90				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		A		A				

3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		56.000.000		56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dok	2	18.000.000	2	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Dok	1	4.500.000	1	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	4.500.000	1	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Dok	1	4.500.000	1	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	4.500.000	1	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	Dok	2	20.000.000	2	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen dan pelaporan administrasi keuangan			2.014.624.925		2.014.624.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	

3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	2.002.624.925	12	2.002.624.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya pengelolaan akuntansi SKPD	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.340.000		200.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Legalitas Bahan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	12	3.120.000	12	3.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	Bulan	12	133.720.000	12	133.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000		40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Perkantoran	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan perkantoran	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.140.000		213.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Internet dan Listrik	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	Bulan	12	166.640.000	12	166.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.220.000		92.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DKP	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Prima	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Prima	Bulan	12	10.220.000	12	10.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan	Ton	21.000	1.650.159.000	21.000	1.650.159.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	20.400		20.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	persen	53		53		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan			880.000.000		880.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan	Dokumen	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Pendukung usaha perikanan tangkap	Paket	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	Paket	6	805.000.000,00	6	805.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil			205.159.000,00		205.159.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi nelayan kecil	Kali	1	28.186.000,00	1	28.186.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Paket	1	70.200.000,00	1	70.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya sosialisasi, dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	Kali	3	106.773.000,00	3	106.773.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			565.000.000		565.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	SOP	1	30.000.000	1	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan TPI	Unit/Paket	2	535.000.000	2	535.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	290	1.015.000.000,00	290	1.015.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	32		32		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kualitas sumberdaya petani pembudidaya ikan			95.000.000,00		95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan bagi petani pembudidaya ikan kecil	Kali	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya sosialisasi, seminar dan bimtek bagi petani pembudidaya ikan	Kali	1	35.000.000	1	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan			920.000.000		920.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidaya ikan	Paket	2	300.000.000	2	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidaya ikan	Paket	5	360.000.000	5	360.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pembudidayaan.	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber air pembudidayaan ikan	Paket	3	200.000.000	3	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	Kecamatan	2	145.501.000,00	2	145.501.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
		Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Kecamatan	12		12		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai,danau,waduk,rawa,genangan dan air lainnya			145.501.000,00		145.501.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan,sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan Tangkap	Kecamatan	12	105.501.000,00	12	105.501.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	Kecamatan	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pengolah Ikan yang dilatih	Orang	20	149.102.125	20	149.102.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
		Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Persen	73		73		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
		Nilai Konsumsi Ikan	Persen	49,55		49,55		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	

3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil			37.291.125		37.291.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya sosialisasi/bintek dan penerapan standart pada Usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kali	1	37.291.125	1	37.291.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan			111.811.000		111.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha PerikananSkala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Paket	2	111.811.000	2	111.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aceh Barat	
	TOTAL ANGGARAN				5.576.087.050,00		5.576.087.050,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan akhir Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, pada tahapan **Finalisasi Rancangan Akhir RKPD**, adalah sebagai berikut (tabel 4.1) :

TABEL 4.1

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6,676,087,050				5,576,087,050			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,616,324,925				2,616,324,925			
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					56,000,000				56,000,000			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 dokumen	8 Dok	18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	18,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusunnya RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	1 Dokumen	8 Dok	4,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	4,500,000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusun dan tersedianya RKA Perubahan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan,	A Nilai	1 dokumen	8 Dok	4,500,000	Dana Transfer Umum- Dana	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	4,500,000

							Perangkat Daerah	Drien Rampak					Alokasi Umum							
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusunnya DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	1 Dokumen	8 Dok	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	4,500,000		
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	1 Dokumen	8 Dok	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	4,500,000		
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	2 Dokumen	8 Dok	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	20,000,000		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,014,624,925						2,014,624,925
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja ASN dan meningkatnya dokumen pelaporan adm keuangan	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	2,002,624,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	2,002,624,925		
3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terlaksananya pengelolaan akuntansi dan adm keuangan SKPD	Meningkatnya Kinerja ASN dan meningkatnya dokumen pelaporan adm keuangan	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	12,000,000		
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									200,340,000						200,340,000
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Kategori Hasil	Tersedianya komponen instalasi listrik	Lancarnya kegiatan dan administrasi	Kab. Aceh Barat,	A Nilai	12 bulan	12 bulan	2,000,000	Dana Transfer		Kategori Hasil	A Nilai	2,000,000		

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Evaluasi LAKIP		perkantoran	Johan Pahwalan, Drien Rampak					Umum-Dana Alokasi Umum		Evaluasi LAKIP		
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya alat tulis kantor	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	30,000,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	6,000,000
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	12,000,000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya legalitas bahan administrasi	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	13,500,000
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya Bahan Bacaan	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	3,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	3,120,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya Biaya perjalanan Dinas	Lancarnya kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan,	A Nilai	12 bulan	12 bulan	133,720,000	Dana Transfer Umum-Dana		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	133,720,000

				SKPD				Drien Rampak					Alokasi Umum					
3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40,000,000				40,000,000		
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya peralatan perkantoran	Lancarnya kegiatan perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	2 unit	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	20,000,000
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya perlengkapan perkantoran	Lancarnya kegiatan perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	3 unit	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	20,000,000
3	25	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								213,140,000				213,140,000		
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya materai	lancarnay kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	1,500,000
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya jaringan internet dan listrik	lancarnay kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	45,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran dan THL	lancarnay kegiatan dan administrasi perkantoran	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	166,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai	166,640,000
3	25	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92,220,000				92,220,000		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kategori	Tersedianya kendaraan	Terlaksananya	Kab. Aceh	A Nilai	12 bulan	12 bulan	70,000,000	Dana		Kategori	A Nilai	70,000,000

					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Evaluasi LAKIP	dinas yang prima	pemeliharaan barang milik daerah	Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak					Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Evaluasi LAKIP			
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Tersedianya kendaraan operasional atau lapangan yan prima	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	10,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai		10,220,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Terpeliharanya dan terawatnya peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Aceh Barat, Johan Pahwalan, Drien Rampak	A Nilai	12 bulan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	A Nilai		12,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							1,950,159,000						1,650,159,000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							1,180,000,000						880,000,000	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	1 dokumen	8 paket	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan	21100 Ton		25,000,000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	Tersedianya sarana pendukung usaha perikanan tangkap	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	1 paket	8 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan	21100 Ton		50,000,000

3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	6 paket	8 paket	1,105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan	21100 Ton	805,000,000
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								205,159,000				205,159,000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan	Terlaksana pelatihan bagi nelayan kecil	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	1 kali	5 kali	28,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan	21100 Ton	28,186,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan	Terlaksana fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	1 paket	5 kali	70,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan	21100 Ton	70,200,000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitas bantuan dana serta kemitraan usaha	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	3 kali	5 kali	106,773,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan	21100 Ton	106,773,000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								565,000,000				565,000,000
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21100 Ton	1 SOP	3 Paket	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Produksi Perikanan	21100 Ton	30,000,000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat	Produksi Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana pelayanan TPI	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	Kab. Aceh Barat, Semua	21100 Ton	2 Unit-Paket	3 Paket	535,000,000	Dana Transfer Umum-	Produksi Perikanan	21100 Ton	535,000,000

					Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	pembudidaya ya ikan	perlindungan lahan pembudidayaan	dan Produksi perikanan budidaya	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		pembudidaya ya ikan		
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ya ikan	Tersedianya perencanaan dan pengadaan sarana pendukung pengelolaan/pemanfaatan sumber daya air pembudidayaan ikan	meningktanya kualitas pengelolaan pembudidaya ikan dan Produksi perikanan budidaya	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Ton	3 paket	11 Paket	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ya ikan	300 Ton	200,000,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							145,501,000				145,501,000		
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							145,501,000				145,501,000		
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Wilayah Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Terawasi	Terlaksana pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan tangkap	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kecamatan	12 kec	12 kecamatan	105,501,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wilayah Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Terawasi	4 Kecamatan	105,501,000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Wilayah Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Terawasi	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi kebijakan pemerintah dan tindakan disiplin kepada pengusaha perikanan budidaya	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan pada wilayah sungai, danau, waduk, rawa, genangan dan air lainnya	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kecamatan	2 kecamatan	12 kecamatan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wilayah Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Terawasi	4 Kecamatan	40,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							149,102,125				149,102,125		

3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						37,291,125					37,291,125		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Terlaksananya sosialisasi, bimtek dan penerapan standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran ikan skala mikro dan kecil	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	1 kali	1 kali	37,291,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	70 Persen	37,291,125
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						111,811,000					111,811,000		
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Tersedianya fasilitas bahan baku industri bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	meningkatnya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Kab. Aceh Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	2 paket	2 paket	111,811,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	70 Persen	111,811,000
								TOTAL	6,676,087,050					5,576,087,050			

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai Akhir Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 yang juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat yang Penyusunannya berpedoman pada RKPD Tahun 2022 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 mampu mendorong pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2022 sekaligus pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2017-2022.

Meulaboh, Agustus 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Barat

Erni Wanti, SH, M.Si

NIP. 19690125 199803 2 003



PPID Dinas Kelautan dan Perikanan

Fachrurozi amir